

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Hamid S. Attamimi, 1992, Makalah, "*Teori perundang-undangan Indonesia*", pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Abdurahman, 1987, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Mengungkap tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Ateng Syafruddin, 1991, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Dati II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2002, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) UII, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Aksara Baru, Jakarta.

- Budiarjo, Miriam. 1997, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- C.S.T.Kansil, 2009, *Hukum Tata Pemerintahan*, Gramedia, Jakarta.
- Damang, 2000, *Pemisahan Kekuasaan Vs Pembagian Kekuasaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darji Daninodiharjo dan Shidarta, 2008 *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Endang Zaelani Sukaya dkk., 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan ke-1, Paradigma, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, Tahun 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Dewi Sartika, Semarang.
- Fitra Arsil, 2005, *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*.
- Hanafi Nurcholis, 2005, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, PT.Grasindo, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Hans Antlöv, 2002 "*Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*", edisi terjemahan oleh Pujo Semedi, LAPPERA, Yogyakarta.
- HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers, Jakarta.
- HB Sutopo, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- I. S. Susanto, 1992, *Realitas Sosial*, Balai Pustaka, Yogyakarta.

- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jawahir Thontowi, 2002, *Islam, Politik, dan Hukum*, Madyan Press, Yogyakarta.
- Jazim Hamidi,dkk, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-1, Total Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, SH., Makalah, *Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat tingkat Pusat*, Jakarta.masuk di hapus sj karena di makah sudah ada.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Grafika, Jakarta.
- Kenneth R. Hoover, 1990, *The Elemenis of Social Scientific Thinking*, terjemahan, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Khumaidi, 2012, Jurnal Kebangsaan "*Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Perspektif Desentralisasi*".
- Koentjaraningrat, 1964 *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini*, Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Djakarta.
- Koesoemah Atmadja, 1979,*Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan di Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Manusiawi, *Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi*, Vol. I No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang.

- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset Yogyakarta.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008, *Sejarah Nasional Indonesia II Zaman Kuno*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov, Research Centre For Politics and Government, Department of Politics and Government, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
- Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2011, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, UB Press, Malang.
- Muh. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid 1*, Jajasan Prapantja, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Flisafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Muh. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid I*, Jajasan Prapantja, Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhariy, 2004, *Negara Hukum (Suatu Studi Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Munir Fuady, 2014, *Teori-Teoris Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Notohamidjojo, 2002, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta. Peter Beilharz (ed), 1973, *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nuraeni T, 2011, *Trias Politica Di Indonesia Antara Separation Of Power Dengan Distribution Of Power Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Patrialis Akbar, 2013, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*, Total Media, Yogyakarta.
- Peter Beilharz (ed), 2002, *Teori-teori Sosial ; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ronny Hannitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. Susanto, 1992, *Realitas Sosial*, Balai Pustaka, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Mendudukan Undang-Undang Dasar*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Sedarmayanti, 2003, *Good Givernance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*, CV Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sinar Grafika, 2017, *Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial -Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (1840-1990)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normaiif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suparto, Jurnal Selat, *“Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam”*.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Flsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung.
- Wayong J.,1979, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta.
- Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islámi Bayn Al-Ashálah wa At-Tajdid*, Tasikmalaya.

Zulkamaen dan Beni Ahlmad Sacbani, 2012. *Hukum Konstitusi*. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pancasila

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015;

Peraturan Permerintah Nomor 47 tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tentang 2010 Tentang Pedoman Pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa/kelurahan;

Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 4 tahun 2015 tentang BPD;

C. JURNAL / ARTIKEL TERKAIT

Cahyono, Heru, dkk. *Jurnal Penelitian Politik: Menggugat Politik Parlemen*. Vol. 8, No. 1, 2011. Jakarta: LIPI.

Fathur Rohman,2016, Disertasi, *Rekonstruksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa untuk mengentaskan kemiskinan (Studi kasus di Kabupaten Demak)*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.

Fatmawati, 2009, Disertasi, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, SH., Makalah, *Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat*, Jakarta.

Roza, Darmini, and Laurensius Arliman, 2017, "*Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa.*" *Padjadjaran Journal of Law*.

Ryane Jasmine. *Jurnal Sistem Pemerintahan Singapura*.

Sultan, 2013. Disertasi, *Nilai Keadilan Dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Yok Sunaryo, 2016. Disertasi. *Prinsip Pemerintahan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Yuhandra, Erga. 2018, *Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi*, Jurnal Ilmu Hukum, UNIFIKASI.

D. INTERNET

See more at: <http://www.nanjung.desa.id/detailpost/bpd-pasca-lahirya-uu-no62014-tentang%20desa#sthash.smy3jE8C.dpuf>

Wikipedia. 2012. *Keadilan Sosial*. http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_sosial

Wikipedia. *Pancasila*, 2012. http://d.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_kedua

www.Artonang.blogspot.co.id/2015/01/undang-undang-legislasi.html.

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-3-I-P3DI-Februari-2013-15.pdf

http://kedesa.id/id_ID/bpd-lembaga-demokrasi-desaya-yang-terlupakan/

<http://legalstudies71.blogspot.com/2018/11/teori-pemisahan-kekuasaan-dan-pembagian.html>.

<http://muzayyahns.blogspot.com/2012/11/pengertian-efektifitas-dan-efisien.html>

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

<http://www.pustaka-online.com/pedes-BPD/index.php>, diakses pada tanggal

<http://www.thamrin.wordpress.com/kewenangan-desa-antara-mimpi-dan-kenyataan>.

<https://datastudi.files.wordpress.com/2011/04/prinsip-prinsip-demokrasi.pdf>

<https://gajimu.com/gaji/gaji-pejabat-negara-ri/tunjangan-anggota-dpr> *SURAT EDARAN SETJEN DPRRI NO.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010*.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#Bentuk-bentuk_demokrasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Amerika_Serikat

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum

<https://www.dosenpendidikan.co.id/negara-hukum/>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/negara-hukum/>

<https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-110-2016-badan-permusyawaratan-desa>

<https://www.parlimen.gov.my/maklumat-umum.html?uweb=dn&>

<https://yogifajarpebrian13.wordpress.com/2011/04/12/pengertian-negara-hukum/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasan-vs-pembagian-kekuasaan.html>,

www.Artonang.blogspot.co.id/2015/01/undang-undang-legislasi.html, 18 januari 2015

